

PENILAIAN POTENSI BENCANA LONGSOR BERDASARKAN TINGKAT KERENTANAN DI KABUPATEN TEGAL

Anggun Prima Gilang Rupaka^{1*}, Sudarno² dan Suharyanto²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

² Staf pengajar Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*E-mail: gilangrupaka@gmail.com

ABSTRACT

Frequency of landslides in Tegal regency increasing every year. The cover area is also increasingly widespread distribution, especially in district Jatinegara, Bojong and Bumijawa. The third areas of this district is a hilly region with a height ranging from 300 - 1200 meters above sea level. Factors that cause landslides by Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Nasional Kementerian Kehutanan are rainfall, slope, rock/soil type, depth of impermeable layer and land use.

The method used in data mining is a method of interviews with residents and stakeholders, and field observations in areas prone to landslides which have been mentioned above. Secondary data used is development plan maps and disaster risk data of Tegal regency from BPBD (Government agencies that deal with natural disaster). The purpose of this paper was to determine the level of vulnerability to disasters especially landslides and provide recommendations on the people who live in areas prone to landslides and determine the role of local governments in providing guidance and socialization in public about avalanche dangers.

The conclusion that can be drawn from this study is that in Tegal regency, especially in disaster-prone areas: the location of the access road to the village has a very damaged condition, the citizens do not know the government agency in charge of disaster due to inhibition of information at government level due to lack of socialization and the villages in Tegal doesn't have adequate evacuation center and evacuation routes.

Keywords: Landslide, vulnerability, Tegal.

1. PENDAHULUAN

Bencana longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Potensi longsor di Indonesia sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2008, tercatat 647 kejadian bencana, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor (Fadli, 2009). Indonesia yang berada di daerah tropis memiliki curah hujan yang berkisar >2000 mm/tahun. Wilayah Indonesia yang berbukit-bukit serta alih fungsi hutan yang tidak semestinya menyebabkan longsor sering terjadi. Faktor-faktor tersebut ditambah dengan curah hujan yang tinggi, posisi Indonesia yang di antara tiga lempeng besar dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng pasifik dan lempeng Indo-australia yang menyebabkan gempa, munculnya sesar atau patahan dan letusan gunung berapi.

Tanah longsor adalah suatu peristiwa alam yang pada saat ini frekuensi kejadiannya semakin meningkat. Fenomena alam ini berubah menjadi bencana alam tanah longsor manakala tanah longsor tersebut menimbulkan korban baik berupa korban jiwa maupun kerugian harta benda dan hasil budaya manusia. Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa daerah perbukitan dan pegunungan, menyebabkan sebagian wilayah Indonesia menjadi daerah yang rawan kejadian tanah longsor. Intensitas curah hujan yang tinggi dan kejadian gempa yang sering muncul, secara alami akan dapat memicu terjadinya bencana alam tanah longsor. Kekuatan tanah tergantung dari ikatan antara partikel penyusun tanah, sedangkan untuk batuan lebih banyak ditentukan oleh retakan pada batuan itu. Air hujan dalam jumlah yang kecil menyebabkan tanah menjadi lembab dan mempunyai efek memperkuat tanah, namun apabila tanah menjadi jenuh air efeknya akan melemahkan ikatan partikel. Molekul air menyusup ke partikel tanah dan menjadi katalisator proses gelinciran antara partikel. Faktor ini yang menyebabkan tanah longsor banyak terjadi pada musim penghujan.

Perkembangan suatu wilayah akan meningkatkan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas ekonomi, adapun ketersediaan lahan yang ada tidak mengalami perkembangan. Penduduk terpaksa menempati lokasi yang tidak layak huni seperti di daerah perbukitan dan lereng pegunungan. Aktivitas masyarakat tersebut menyebabkan tingkat kerawanan bencana menjadi semakin meningkat, manakala lahan dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lahan.

Ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan tanah longsor beserta peraturan yang bisa dijadikan dasar dalam setiap aktivitas pengembangan merupakan hal yang sangat diperlukan demi mencegah dan meminimalkan korban jiwa dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam tanah longsor, dan lebih jauh sebagai masukan bagi penyusunan tata ruang dalam suatu kawasan rawan tanah longsor.

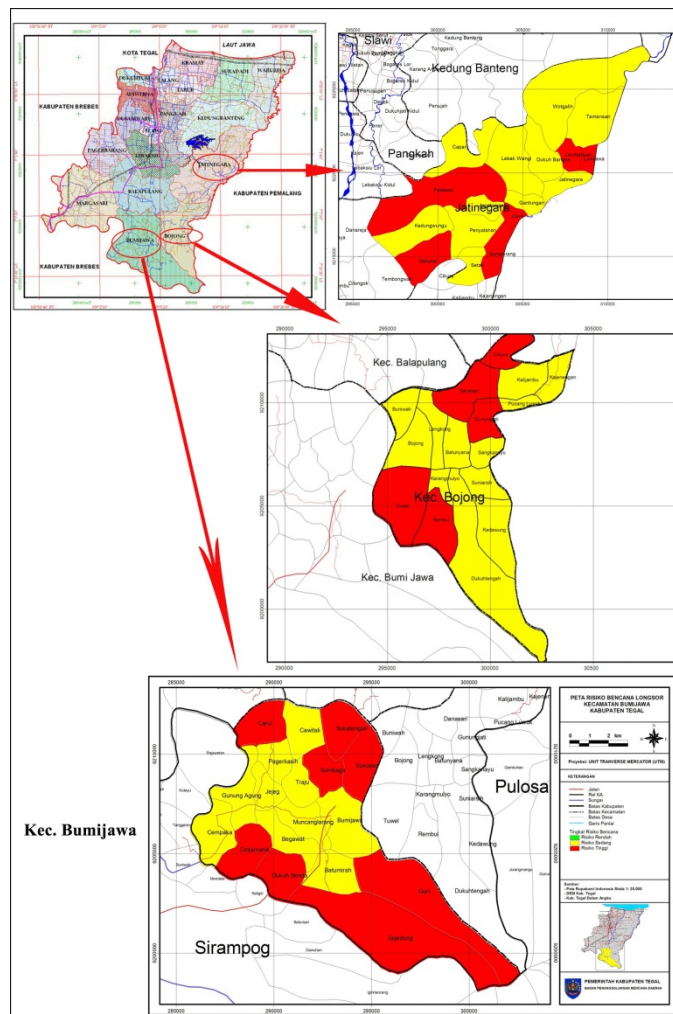
Kabupaten Tegal menurut posisi geografis terletak di 108° 57' 6" – 109° 21' 30" BT dan 6° 50' 41" – 7°15' 30" LS [1]. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang meliputi 281 Desa dan 6 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tegal mencapai 87.879 Ha. Dari luasan wilayah tersebut, sebagian besar merupakan lahan kering 47.601 Ha dan sebagian lainnya berupa lahan sawah 40.278 Ha. Dari seluruh kecamatan yang ada, tujuh diantaranya memiliki wilayah yang memiliki topografi berbukit-bukit, yaitu Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng. Wilayah pegunungan dan perbukitan memiliki resiko bahaya longsor yang besar.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui tentang tingkat kerentanan di daerah rawan longsor kabupaten Tegal dan memberikan rekomendasi pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor dan mengetahui peran serta pemerintah daerah dalam memberikan arahan pada masyarakat tentang bahaya longsor.

2. METODOLOGI

Lokasi penelitian dilaksanakan di kecamatan Jatinegara, Bojong dan Bumi Jawa. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada tingkat kebahayaan tanah longsor pada daerah tersebut cukup tinggi dan sering terjadinya bencana longsor di kawasan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta RTRW Kabupaten Tegal, Peta Administrasi Kabupaten Tegal dan data tingkat kerawanan longsor dari BPBD. Data kerentanan didapat dengan wawancara dengan warga di daerah rawan longsor dan *stakeholder* (pemerintah desa dan kecamatan) di daerah tersebut. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepedulian dan kewaspadaan warga terhadap bahaya longsor yang terjadi di tempat tinggal mereka. Hal ini mengarah kepada seberapa besar tingkat kerentanan yang mereka miliki dalam menghadapi bencana, khususnya longsor. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2012, tingkat kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

3. HASIL DAN DISKUSI



Gambar 1. Peta Administrasi dan Peta Resiko Bencana Kab. Tegal
Sumber: BPBD Kab. Tegal

Wilayah di daerah kabupaten Tegal di bagian selatan merupakan wilayah perbukitan yang memiliki variasi kemiringan lereng yang cukup beragam (ketinggian 300 – 1500 mdpl).Kejadian longsor yang sering melanda kecamatan Jatinegara, Bojong dan Bumijawa yang berada di wilayah tersebut sangat sering terjadi. Faktor yang menyebabkan longsor yang terus menerus terjadi antara lain lereng yang curam, penggunaan lahan yang tidak semestinya, agregat tanah yang tidak stabil dan lain-lain (BPBD, 2013).

Data dari BPBD menunjukkan bahwa tingkat potensi korban longsor di ketiga kecamatan tersebut terbilang cukup tinggi, yang ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga di Daerah Rawan Longsor

Kecamatan	Jumlah KK	Jml KK di Daerah Rawan Longsor
Bumijawa	19.997	3.610
Jatinegara	17.425	453
Bojong	14.278	2.517

Sumber: BPBD Kabupaten Tegal

Data di atas menunjukkan bahwa 13% dari jumlah total kepala keluarga yang tinggal di wilayah kecamatan Jatinegara, Bojong dan Bumijawa kemungkinan mendapatkan imbas langsung dari bencana longsor. Di desa Padasari Kecamatan Jatinegara tahun 2013 telah terjadi satu kali longsor yang tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan kerugian materiil yang cukup banyak bagi warganya bila dilihat dari kondisi perekonomian yang mayoritas bekerja sebagai petani atau pekerja serabutan. Di wilayah ini banyak rumah warga yang terkena dampak dari pergerakan tanah yang tidak bisa dikontrol sehingga rumah mereka retak-retak bahkan terbelah. Kondisi jalan yang menghubungkan jalan utama sepanjang 5 km rusak parah. Kondisi ini menyulitkan warga yang akan menuju Puskesmas terdekat, jarak 6 km harus ditempuh dalam waktu \pm 30 menit. Jalan yang sering rusak walau sudah sering diaspal ulang akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Masalah yang sama dihadapi oleh kecamatan Bojong dan Bumijawa, tidak adanya pusat dan jalur evakuasi yang memadai menyulitkan bila terjadi longsor yang mengakibatkan banyak pengungsi.

Kondisi paling parah terjadi di Desa Dukuh Benda yaitu terdapat wilayah yang tiap tahun longsor sehingga daerah yang awalnya datar sekarang menjadi lembah yang digunakan oleh warga untuk bercocok tanam. Di dusun Dukuh Tengah desa Dukuh Benda Kecamatan Bumijawa sebagian warganya sudah direlokasi ke tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan diberi bantuan material bangunan senilai Rp. 10.000.000 oleh Pemerintah Provinsi.

Di Desa Batu Nyana kecamatan Bojong pergeseran tanah yang mengakibatkan rumah warga yang retak banyak terjadi, terutama ketika pasca hujan lalu tanah menjadi kering. Longsor tahun 2013 di desa Batu Nyana terjadi di wilayah pertanian yang ditanami padi yang terletak di kaki Bukit Anjing. Dari ketiga wilayah desa di ketiga kecamatan, desa Batu Nyana merupakan yang paling dekat dengan pusat pemerintah kecamatan sehingga memudahkan warga menuju Puskesmas terdekat. Namun jalan yang sering tertutup oleh tanah longsor dapat menyulitkan akses menuju desa Batu Nyana.

Menurut keterangan para perangkat desa di ketiga kecamatan, Pemerintah Kabupaten sering mengadakan sosialisasi bahaya tanah longsor. Namun dari keterangan warga, pemerintah desa tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada warga tentang bahaya longsor, bahkan warga desa tidak mengetahui badan pemerintah yang mengurus tentang bencana alam. Informasi yang terhambat ini dapat menjadi halangan untuk mengurangi potensi kerawanan longsor di kabupaten Tegal. Di lain pihak, BPBD berupaya melakukan mitigasi di daerah rawan longsor dengan membangun talud penahan longsor di daerah pemukiman warga. Pembangunan saluran-saluran air untuk mengatasi limpasan air hujan juga dibangun oleh warga dari bantuan pemerintah serta swadaya masyarakat.

Informasi yang terhambat akan menjadi akar utama masalah kerentanan terhadap longsor. Warga yang tidak peduli dan tidak mengetahui tentang bahaya dan penyebab longsor akan menjadi korban. Sebaiknya pemerintah dan badan pemerintahan yang menangani tentang longsor dapat lebih “agresif” dalam menyampaikan sosialisasi, tidak hanya diberikan pada para pemangku kepentingan di tingkat desa saja tetapi juga mengawasi sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada warganya. Warga yang mengetahui tentang bahaya longsor hanya yang berpendidikan tinggi, sedangkan mayoritas mata pencaharian warga di ketiga kecamatan adalah bertani. Para petani memakai lahan yang bukan miliknya, melainkan milik Perhutani.



Gambar 2. Kondisi Wilayah Desa Rawan Longsor di Kabupaten Tegal

4. KESIMPULAN

Wilayah ketiga kecamatan yang memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu rusaknya akses jalan, longsor yang melanda setiap tahun, pengetahuan tentang bahaya longsor serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya longsor dan tidak adanya fasilitas evakuasi, jalur evakuasi dan pusat pengobatan yang mudah dijangkau oleh warga.

Kurangnya kesadaran pemerintah desa untuk memberikan pengarahan kepada warganya tentang bahaya longsor serta penyebabnya memberikan andil yang cukup besar bagi tingginya tingkat kerentanan di wilayah kecamatan Jatinegara, Bojong dan Bumijawa. Semestinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku bagian pemerintah yang menangani tentang masalah bencana alam harus meningkatkan kinerja, terutama dibidang pelatihan bahaya bencana alam kepada para pemangku kepentingan di desa atau kecamatan.

5. REFERENSI

- Bappeda Kabupaten Tegal. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 2013. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk yang Menempati Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal Tahun 2013
- Hary C. Hardiyatmo. 2006. Penanganan Tanah Longsor dan Erosi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibukota Kecamatan Jatinegara, Bappeda Kabupaten Tegal.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2007. Pedoman Penataan Ruang: Kawasan Rawan Bencana Longsor. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Fadli, Ade, (2009). "Sejuta Bencana Terencana di Indonesia". <http://himpala.com/forums/Thread-Sejuta-Bencana-Terencana-di-Indonesia>. Diakses 11 April 2013.